

## ABSTRAK

### **Abdul Hakim : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. tentang Sengketa Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Jabar Banten Syariah (Bjbs) Kcp Sukabumi**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, Dimana hal tersebut berlawanan dengan Undang-undang yang ada di Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-undang No 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Contohnya adalah suatu sengketa yang terjadi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusan No 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. dimana penggugat merasa adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu pihak bank. Sehingga penggugat CV. Marissa Holiday mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibadak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana duduk perkara serta isi dari putusan No 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. tentang pembiayaan *murabahah*, dasar-dasar pertimbangan hakim dan juga bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan No 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. tentang produk pembiayaan *murabahah*.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang merujuk kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan). Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri atas penetapan Putusan No. 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. Fatwa DSN MUI, KUHPerdara, KHES, dan bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : 1) Isi putusan yang terdapat dalam Putusan Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) penemuan hukum yang diterapkan oleh hakim tidak terlepas dari metode penemuan hukum seperti metode hukum penafsiran yang sehingganya dapat memutuskan hukum dengan tepat. 3) Dasar putusan dan ammar putusan yang terdapat di dalam Putusan Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. sudah sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.